

## PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH – PETUNJUK PELAKSANAAN

2024

PERBUP TEGAL NO. 30, BD TH 2024 , NO. 30 , 478 HLM

### PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (5), Pasal 128, Pasal 137 ayat (5), Pasal 142 ayat (7), Pasal 143 ayat (3), Pasal 145 ayat (5), Pasal 152 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 154 ayat (3), Pasal 157 ayat (3), Pasal 159 ayat (4), Pasal 160 ayat (11), Pasal 161 ayat (5), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No13 Tahun 1950 , UU No 23 Tahun 2014 , UU No 1 Tahun 2022 , UU No 11 Tahun 2023 , PP No 69 Tahun 2010 , PD Kab Tegal No 11 Tahun 2023
- Pajak dipungut berdasarkan: Penetapan Bupati dan Perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas: a. PBB-P2 , b. Pajak Reklame , c. PAT , d. Opsen PKB , e. Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB , b. PBJT atas: (1. Makanan dan/atau Minuman , 2. Tenaga Listrik , 3. Jasa Perhotelan , 4. Jasa Parkir , 5. Jasa Kesenian dan Hiburan ) , c. Pajak MBLB , d. Pajak Sarang Burung Walet.

**CATATAN** : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2024

- Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tegal No 30 Tahun 2024 ini maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 37), dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- Lampiran : 318 hlm